



BAB IV.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Permasalahan Pembangunan

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Cakupan masalah yang luas, sangat mendesak dan berpengaruh signifikan.
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa mendatang dan berdampak negatif.
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.

Adapun Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Pembangunan Daerah di Kabupaten Bantul disesuaikan dengan bidang urusan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat digambarkan melalui Tabel 4.1 berikut:



Tabel 4.1.
Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritasdi Kabupaten Bantul

No.	Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Faktor Faktor Penentu Keberhasilan
I. Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
1	Pendidikan	(1) Pemerataan dan perluasan akses Pendidikan masih rendah. (2) Peningkatan Mutu, relevansi dan daya saing pendidikan masih rendah. (3) SDM Pengelolaan Sekolah yang belum optimal. (4) Sarana prasarana pendidikan belum memenuhi SPM (buku teks,laboratorium, ruang kelas, perpustakaan dan ruang guru/kepala sekolah.)	(1) Sarana dan prasarana lengkap. (2) Optimalisasi pendidik dan pemberdayaan guru. (3) Bantuan Operasional Pendidikan kepada sekolah. (4) Motivasi Pendidikan Tinggi.
2	Kesehatan	(1) Angka kematian ibu melahirkan cenderung fluktuatif. (2) Masih tingginya angka kematian bayi. (3) Masih adanya balita gizi buruk (4) Angka kesakitan penyakit menular tinggi. (5) Masih adanya daerah endemik (6) Semakin meningkatnya penyakit tidak menular.	(1) Adanya pemetaan dan pengawasan ibu hamil/bersalin/nifas berisiko. (2) Optimalisasi kualitas <i>Antenatal Care</i> (ANC). (3) Koordinasi intensif antar <i>stakeholder</i> terkait <i>Feedback</i> ibu hamil dan pemantauan dengan kewaspadaan dini RS (KDRS). (4) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam deteksi dini ibu hamil/nifas berisiko. (5) Meningkatnya program KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). (6) Meningkatnya peran <i>stakeholder</i> lintas sektor dalam upaya penurunan AKI. (7) Deteksi dini penyakit penyerta TB seperti HIV, pneumonia dan <i>Multi Drug Resistant</i> (MDR). (8) Meningkatnya peran serta dari layanan kesehatan swasta dalam penemuan TB. (9) Meningkatnya kewaspadaan terhadap siklus 5 tahunan maupun 3 tahunan DB. (10) Meningkatnya kapasitas tempat tidur RS
3	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	(1) Pemeliharaan jalan tidak menjangkau seluruh panjang jalan yang mengalami	(1) Peningkatan jalan dalam kondisi rusak/rusak berat berdasarkan prioritas dan peningkatan



No.	Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Faktor Faktor Penentu Keberhasilan
		kerusakan. (2) Belum terpadunya perencanaan pembangunan drainase antar wilayah. (3) Pemahaman masyarakat tentang pentingnya perawatan jaringan irigasi rendah. (4) Masih adanya konstruksi jaringan irigasi berupa tanah (belum pasangan batu).	spesifikasi konstruksi jalan sesuai dengan struktur tanah dan beban kendaraan yang melintas. (2) Terpenuhinya target pelaksanaan secara bertahap dan berkelanjutan dengan mengupayakan terobosan program-program pembiayaan. (3) Pemerintah desa kuat dan swadaya masyarakat meningkat. (4) Jaringan irigasi dalam kondisi baik dan berfungsi baik.
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	(1) Masih adanya kawasan kumuh. (2) Harga rumah tidak terjangkau oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah. (3) Kurangnya Fasilitas pemakaman Umum.	(1) Tertatanya kawasan kumuh secara bertahap dan berkelanjutan. (2) Terbangunnya Rusunawa. (3) Penerapan hunian berimbang. (4) Fasilitas rumah murah untuk MBR. (5) Peningkatan penanganan RTLH. (6) Penyediaan area pemakaman umum oleh Pemerintah.
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	(1) Belum optimalnya pelaksanaan penegakan perda; (2) Belum optimalnya pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat; (3) Wilayah Bantul rawan terhadap gempa bumi, longsor, banjir, gelombang pasang, kebakaran dan kekeringan; (4) Belum optimalnya partisipasi pemilih dalam pemilu.	(1) Peningkatan pembinaan dan penyuluhan keamanan lingkungan melalui pemberdayaan SDM Linmas; (2) Peningkatan patroli wilayah; (3) Peningkatan kerjasama dengan TNI, Polri, dan Kejaksaan dalam rangka ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; (4) Penyuluhan/ sosialisasi perda tentang kantrantibmas; (5) Peningkatan operasi penegakan perda melalui operasi yustisi dan non yustisi; (6) Peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga kewaspadaan dini dan menjaga keamanan lingkungan; (7) Penyusunan rencana aksi pengendalian keamanan lingkungan; (8) Pembangunan berbasis risiko bencana; (9) Peningkatan pendidikan politik masyarakat; (10) Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait pemantauan orang asing; (11) Peningkatan kerukunan umat beragama; (12) Peningkatan



No.	Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Faktor Faktor Penentu Keberhasilan
			pendidikan wawasan kebangsaan; (13) Ormas, Orsos, dan LSM paham tentang hak dan kewajibannya.
6	Sosial	Masih tingginya penyandang masalah sosial	(1) Penegakan Perda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS dan pelibatan semua <i>stakeholder</i> dalam menyelesaikan masalah PMKS. (2) Meningkatnya koordinasi antar PSM dan antar pilar partisipan kesejahteraan sosial. (3) Peningkatan koordinasi OPD terkait untuk membantu pelaksanaan validasi, terutama dalam pemberian NIK pada setiap peserta PBI-JKN. (4) Peningkatan fasilitas rehabilitasi kesejahteraan sosial
II. Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
1	Tenaga Kerja	(1) Masih banyaknya pekerja yang mendapatkan upah dibawah UMK. (2) Masih rendahnya ketersediaan tenaga terampil.	(1) Adanya <i>job canvassing</i> dan informasi pasar kerja melalui bursa kerja <i>on-line</i> secara reguler. (2) Implementasi dan penegakan aturan UMK. (3) Tenaga Kerja mempunyai ketrampilan yang dibutuhkan pasar kerja. (4) Meningkatnya produktivitas tenaga kerja. (5) Adanya pelatihan kewirausahaan secara berkelanjutan.
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(1) Belum optimalnya pemberdayaan perempuan. (2) Masih tingginya angka KDRT	(1) Peningkatan peranserta perempuan dalam pengambilan kebijakan publik. (2) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keadilan dan kesetaraan gender.



No.	Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Faktor Faktor Penentu Keberhasilan
3	Ketahanan Pangan	(1) Pola konsumsi keanekaragaman pangan masyarakat belum optimal. (2) Inovasi pengolahan pangan lokal masih rendah. (3) Masih terdapat desa rawan pangan.	(1) Adanya pelatihan petani yang berumur relatif muda dengan materi agribisnis. (2) Terasilatasinya pengembangan pangan berbasis sumber daya lokal. (3) Adanya diversifikasi pangan dengan pangan lokal. (4) Pemberdayaan dan pengembangan lumbung pangan masyarakat. (5) Penanganan desa rawan pangan. (6) Monev peredaran makanan secara berkala. (7) Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier.
4	Pertanahan	(1) Tanah hak milik masih banyak yang belum bersertifikat.	Adanya pelaksanaan program PTSL
5	Lingkungan Hidup	(1)Belum adanya personil analis laboratorium (2) Penurunan kualitas air sungai dan udara. (3) Pengelolaan limbah masyarakat dan dunia industri masih rendah. (4) Banyaknya kerusakan lahan akibat penambangan.	(1) Terisinya personil secara bertahap. (2) Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup. (3) Bertambahnya Penanaman pohon dan menambah luasan ruang terbuka hijau.
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(1) Cakupan kepemilikan KTP-el belum optimal.	(1) Penyediaan sarana dan prasarana untuk pelayanan Adminduk dan Pencatatan Sipil. (2) Koordinasi secara intensif antar <i>stakeholders</i> untuk kesepakatan penanganan bagi WNI yang pergi ke LN. (3) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan perekaman KTP melalui gerakan GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk).
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(1) Kinerja LPMD belum optimal. 2) Belum semua desa memiliki Bumdes. 3) Sarana dan prasarana pasar desa belum memadai.	(1) Intensifikasi pelatihan kepada masyarakat. (2) Meningkatnya kapasitas SDM pemerintah desa. (3) Adanya pemberdayaan usaha ekonomi yang sudah ada dalam rangka mendorong



No.	Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Faktor Faktor Penentu Keberhasilan
			percepatan pertumbuhan ekonomi desa. (4) Penerapan TTG yang telah dikembangkan lembaga penelitian dan pengembangan seperti Pusat Pengembangan Teknologi Tepat Guna (PPTTG) dan LIPI. (5) Adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai. (6) Intensifikasi diseminasi tentang manfaat P2WKSS.
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(1) Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pembangunan keluarga dan keluarga terencana. (2) <i>Unmed need</i> KB masih relatif tinggi. (3) Banyak pernikahan usia dini.	(1) KIE perlu ditingkatkan dari sisi kualitatif dan kuantitatif. (2) Tertatanya PLKB dan peningkatan peran dari IMP dan kader. (3) Terbentuknya kelompok-kelompok PIK remaja dan KIE bagi remaja.
9	Perhubungan	(1) Kurangnya fasilitas keselamatan lalu lintas dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas. (2) Kesadaran dan keselamatan berlalu lintas rendah.	(1) Meningkatnya kualitas pelayanan angkutan umum dengan adanya penataan dan pemerataan trayek angkutan umum pada pusat-pusat kegiatan yang belum tersedia angkutan umum. (2) Meningkatkan sosialisasi keselamatan berlalu lintas. (3) Adanya rekayasa lalu lintas untuk mengurangi kemacetan. (4) Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan. (5) Meningkatnya ketersediaan perlengkapan jalan.
10	Komunikasi dan Informatika	(1) kurangnya kapasitas optimalnya <i>warehouse</i> data yang ada. (2) Belum terintegrasinya data aplikasi telematika di masing masing OPD. (3) Kurangnya informasi yang akurat berbasis kelompok masyarakat. (4) kurangnya OPD yang memiliki PPID Aktif. (5) perlunya SDM yang terampil bidang TIK di era digital.	(1) Peningkatan kualitas dan kuantitas <i>warehouse</i> data serta optimalisasi secara berkelanjutan. (2) Tumbuhnya komitmen dan motivasi Pimpinan OPD untuk penggunaan data secara bersama dan terintegrasi. (3) Membangun aplikasi sistem informasi yang mampu mengintegrasikan seluruh data OPD. (4) Memperluas target sosialisasi tentang pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat. (5)



No.	Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Faktor Faktor Penentu Keberhasilan
			Memperluas target sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik hingga tingkat staf/petugas pengelola informasi. (6) Perlunya Pelatihan SDM bidang TIK.
11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	(1)Koperasi belum menjadi lembaga ekonomi yang optimal membantu masyarakat. (2) Kelembagaan dan manajemen koperasi belum optimal. (3) Koperasi banyak yang tidak aktif. (4) Daya saing produk UKM perlu ditingkatkan	(1) Revitalisasi koperasi. (2) Berkembangnya sistem kemitraan antara Koperasi dengan UKM. (3) Penguatan kelembagaan. (4) Tumbuhnya jiwa kewirausahaan. (5) Fasilitasi permodalan. (6) Pelatihan teknis. (7) Pengembangan industri kreatif.
12	Penanaman Modal	(1) Meskipun mencapai target, namun realisasi investasi termasuk rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan investasi daerah lainnya. (2) Ketersediaan Lahan terbatas. (3) Infrastruktur kawasan terbatas. (4) Pelayanan perijinan belum optimal	(1)Adanya promosi investasi. (2) Beroperasinya Kawasan Industri baik di Kawasan Industri Piyungan maupun di Kawasan Peruntukan Industri Sedayu. (3) Adanya Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Perpres 97 Tahun 2014 dalam rangka memudahkan investor dalam pengurusan perizinan dan non perizinan penanaman modal. (4) Penggunaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dalam pelayanan perizinan dan non perizinan.
13	Kepemudaan dan Olahraga	(1) Masih terbatasnya wirausahawan dari kalangan pemuda. (2) Sarana dan prasarana olahraga belum optimal. (3) Prestasi olahraga belum optimal. (4) Belum optimalnya gerakan pramuka dikalangan non pelajar.	(1) Jiwa kewirausahaan para pemuda tinggi. (2) Adanya seleksi atlet di tingkat kabupaten. (3) Adanya sarana olahraga indoor dan kolam renang yang memiliki standar nasional. (4) Meningkatkan Gerakan Saka Taruna Tani dan Saka Wana Bakti.
14	Statistik	(1) Data tidak <i>up-to-date</i> . (2) Pengumpulan data masih manual. (3) Belum ada kesamaan persepsi data.	(1) Koordinasi secara intensif untuk menyatukan data sesuai peruntukannya. (2) Adanya Pelatihan bagi operator data di berbagai SKPD untuk mengoperasikan sistem pengumpulan data



No.	Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Faktor Faktor Penentu Keberhasilan
			secara <i>on-line</i> .
15	Persandian	(1) Terbatasnya Peralatan Pengamanan Informasi; (2) Belum Optimalnya Komunikasi antar OPD; (3) Belum Optimalnya Jaring Komunikasi sandi Daerah.	(1) Peningkatan pengamanan informasi melalui persandian; (2) Peningkatan sarana dan prasarana komunikasi; (3) Membangun komunikasi dengan jajaran persandian di pusat maupun daerah melalui Forkomsanda.
16	Kebudayaan	(1) Belum adanya kebijakan pokok-pokok pikiran, rencana dan strategi pelestarian kebudayaan yang mencakup: perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan daerah. (2) Belum adanya identifikasi dan kodifikasi budaya daerah. (3) Belum adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk pengembangan dan aktualisasi budaya.	(1) Tersedianya potensi budaya (baik benda maupun tak benda), termasuk di dalamnya pelaku seni, kelompok-kelompok kesenian, pakar dan pemerhati kebudayaan; (2) Adanya kesadaran bersama (<i>multi stakeholder</i> kebudayaan) untuk terlibat dalam upaya pelestarian kebudayaan; (3) Tersedianya potensi sarana dan prasarana yang dapat dikembangkan menjadi sarana dan prasarana yang memadai untuk pengembangan dan aktualisasi budaya.
17	Perpustakaan	(1) Kurangnya koleksi bahan pustaka. (2) Cakupan pelayanan Perpustakaan belum optimal; (3) Belum optimalnya perpustakaan digital	(1) Peningkatan koleksi bahan pustaka. (2) Optimalnya sarana dan prasarana. (3) Pengembangan SDM perpustakaan.
18	Kearsipan	(1) Belum optimalnya sarana dan prasarana pengolahan, layanan dan pameran arsip. (2) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas tenaga arsiparis. (3) Kurangnya kesadaran pentingnya pengelolaan kearsipan.	(1) Apresiasi kearsipan dan penyuluhan bagi seluruh pejabat di SKPD, lurah, dan kepala Puskesmas se-Kabupaten Bantul. (2) Menambah proporsi Diklat kearsipan bagi petugas arsip dan arsiparis. (3) Adanya sosialisasi Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan serta diupayakan agar tata kearsipan dimasukkan dalam materi pemeriksaan Inspektorat.
III. Urusan Pilihan			
1	Kelautan dan Perikanan	(1) Keterbatasan benih dan induk berkualitas. (2) Produksi perikanan masih	(1) Penyediaan bibit ikan unggul. (2) Mempermudah akses informasi kondisi cuaca



No.	Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Faktor Faktor Penentu Keberhasilan
		rendah.	dan iklim bagi para nelayan. (3) Meningkatkan kemampuan nelayan dan sarana dan prasarana penangkapan ikan untuk menangkap ikan di jalur penangkapan ikan II dan III. (4) Peningkatan kapasitas kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan.
2	Pariwisata	(1) Manajemen Pengelolaan Pariwisata belum optimal. (2) Kualitas sarana dan prasarana pariwisata belum optimal. (3) Sebaran kunjungan wisatawan tidak merata	(1) Peningkatan sarana prasarana wisata, dan penguatan kapasitas SDM serta lembaga pengelolaan obyek wisata. (2) Pelaksanaan kampanye dan pembinaan Sadar Wisata secara kontinyu dengan memanfaatkan semua media. (3) Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata meliputi infrastruktur dan fasilitas pendukung. (4) Tersusunnya RDKP untuk 17 kecamatan dan RTRW untuk setiap obyek wisata sebagai penjabaran RIPPADA Kabupaten Bantul dalam rangka pembangunan kepariwisataan secara terpadu dan terintegrasi. (5) Optimalisasi promosi wisata.
3	Pertanian	(1) Kelembagaan Petani daya tawarnya rendah. (2) Penerapan teknologi anjuran lemah. (3) Regenerasi SDM petani makin sulit. (4) Penyediaan Saprodi belum optimal. (5) Belum tersedianya data ternak menurut jenis kelamin dan umur. (6) Produktivitas ternak belum optimal. (7) Tingginya alih fungsi lahan. (8) Belum optimalnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.	(1) Pendampingan kepada kelompok tani, demplot, pelatihan dan sekolah lapangan. (2) Gerakan penggunaan pupuk berimbang. (3) Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur yang rusak. (4) Pelatihan penanganan pasca panen. (5) Pemanfaatan lahan marginal untuk penanaman hijauan pakan ternak berkualitas dan pengolahan pakan ternak alternatif (fermentasi, silase). (6) Pendataan ternak menurut jenis kelamin dan umur. (7) Aktifnya Unit Pengolah Pakan (UPP) Non Ruminansia dalam pembuatan pakan buatan. (8) Pengendalian laju alih fungsi lahan. (9) Asuransi Pertanian.



No.	Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Faktor Faktor Penentu Keberhasilan
4	Kehutanan	Kewenangan kabupaten/kota dalam urusan kehutanan berupa pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) kabupaten/kota. Kabupaten Bantul tidak memiliki TAHURA sehingga urusan kehutanan tidak dilaksanakan di Kabupaten Bantul.	
5	Energi dan Sumber daya Mineral	(1) Adanya Penambangan ilegal.	(1) Terlaksananya pengawasan dan pengendalian berdasarkan peraturan perundangan.
6	Perdagangan	(1) Keterbatasan jangkauan pelayanan dan fasilitasi promosi produk Bantul. (2) Mayoritas pergerakan harga dan distribusi barang tidak secara langsung dikontrol oleh Pemerintah tetapi melalui mekanisme pasar.	(1) Pemanfaatan teknologi informasi untuk promosi produk Kab. Bantul. (2) Melakukan operasi pasar
7	Perindustrian	(1) Industri kecil baru sebagian yang memiliki SP-IRT. (2) Daya saing industri rendah. (3) Keterbatasan lahan dan infrastruktur industri. (4) Kelembagaan, pemasaran dan sumberdaya lemah. (5) Pengembangan industri kreatif belum optimal.	(1) Terstandarisasinya industri dengan SNI, SVLK, HKI, Sertifikasi Halal. (2) Adanya badan pengelola Kawasan Industri Piyungan. (3) Kemudahan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar/Badan Hukum bagi kelompok IKM.
8	Transmigrasi	(1) Koordinasi dengan daerah penerima lemah. (2) Kuota transmigran ditentukan oleh kebijakan pusat.	(1) Koordinasi secara intensif dengan daerah penerima, Pemda DIY dan Kementerian Transmigrasi. (2) Verifikasi kepada calon transmigran sehingga akan diperoleh calon transmigran yang mempunyai minat, motivasi, berketrampilan serta memenuhi syarat.
IV. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan			
1	Fungsi Penunjang Perencanaan	(1) Konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran belum optimal; (2) Musrenbang belum efektif menyerap aspirasi masyarakat; (3) Pengendalian kebijakan dan perencanaan belum optimal.	(1) SIM Terintegrasi. (2) Komitmen dalam penerapan Pagu Indikatif Kecamatan. (3) Komitmen terhadap hasil pengendalian untuk bahan perencanaan yang berkelanjutan.



No.	Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Faktor Faktor Penentu Keberhasilan
2	Fungsi Penunjang Keuangan	(1) Pengelolaan aset daerah belum optimal; (2) Belum optimalnya pencapaian target pendapatan daerah; (3) Pengelolaan keuangan belum optimal.	(1) Peningkatan pengelolaan barang milik daerah; (2) Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah; (3) Peningkatan disiplin anggaran.
3	Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Belum optimalnya profesionalisme dan kompetensi PNS.	(1) Adanya sistem aplikasi kepegawaian yang terpadu dan terintegrasi. (2) Melakukan analisis kepegawaian. (3) Melakukan peningkatan kapasitas pegawai.
4	Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan	(1) Secara kelembagaan fungsi Litbang terbatas pada penelitian yang menunjang pada proses perencanaan dan sinergitas antara pemerintah /pemerintah daerah, akademisi dan masyarakat; (2) Belum tersedia tenaga fungsional peneliti.	(1) Peningkatan kerjasama penerapan hasil penelitian yang dihasilkan oleh akademisi dan lembaga penelitian; (2) Adanya <i>Roadmap</i> Sistem Inovasi Daerah; (3) Diterbitkannya Jurnal Riset Daerah secara berkala.
5	Fungsi Penunjang Lainnya		
	a. Fungsi Penunjang Pengawasan	(1) Tindak lanjut temuan belum optimal; (2) Kapasitas Tenaga Pemeriksa dan aparaturnya terbatas.	(1) Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan; (2) Pemberdayaan Aparatur pengawasan dan tenaga pemeriksa.
	b. Fungsi Penunjang Perumusan Kebijakan	(1) Belum optimalnya pelayanan dokumentasi hukum; (2) Belum optimalnya koordinasi perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang kesejahteraan rakyat yang meliputi: kependudukan dan ketenagakerjaan, sosial kemasyarakatan, pendidikan dan kesehatan; (3) Terbatasnya SDM layanan pengadaan barang dan jasa pemerintahan; (4) Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi; (5) Pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa belum optimal; (6) Belum optimalnya kebijakan pengembangan	(1) Peningkatan layanan legislasi rancangan peraturan perundang-undangan, penyusunan produk hukum daerah, penyuluhan hukum, pemberian bantuan hukum, pengawasan produk hukum pemerintah desa, publikasi peraturan perundang-undangan, pembinaan pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH); (2) Melaksanakan perumusan kebijakan kependudukan dan ketenagakerjaan, sosial kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan sosial bagi warga miskin, pendidikan dan kesehatan; (3) Peningkatan pelayanan pengadaan barang dan jasa melalui layanan



No.	Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Faktor Faktor Penentu Keberhasilan
		ekonomi masyarakat.	LPSE; (4) Peningkatan kinerja ASN melalui evaluasi analisis jabatan, evaluasi analisis beban kerja; (5) Optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi; (6) Melakukan kajian kebijakan kualitas pelayanan publik; (7) Peningkatan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan APBD, pembuatan pedoman pelaksanaan pembangunan; (8) Peningkatan kapasitas SDM, keuangan dan kelembagaan desa; (9) Peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum; (10) Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah; (11) Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan lembaga; (12) Peningkatan kajian pengembangan potensi ekonomi masyarakat termasuk sarana prasarana dan lembaga ekonomi daerah; (13) Peningkatan Kualitas Kehumasan dan Keprotokolan.
	c. Fungsi Penunjang Pemerintahan Umum	Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi program kegiatan SKPD di wilayah kecamatan.	Optimalisasi dan peningkatan fungsi kecamatan dalam koordinasi dan peningkatan kualitas layanan publik.



4.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah di masa mendatang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan, jika dinamika eksternal khususnya selama 3 (tiga) tahun yang akan datang, diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Isu strategis diidentifikasi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah kabupaten;
2. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
3. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
4. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
5. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

4.2.1. Kajian Isu Internasional dan Isu/Kebijakan Pembangunan Nasional

Penentuan isu strategis didahului dengan *review* terhadap isu internasional dan kebijakan pembangunan nasional yang relevan dalam memberi arah bagi pembangunan Kabupaten Bantul. Hasil *review* akan melengkapi isu strategis yang diperoleh dari kajian terhadap kondisi Kabupaten Bantul.

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebagai pedoman pembangunan negara dalam kurun waktu tersebut. RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden.



Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah: TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.



6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

b. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah sebuah agenda integrasi ekonomi negara-negara ASEAN yang bertujuan untuk menghilangkan atau meminimalisasi hambatan-hambatan di dalam melakukan kegiatan ekonomi lintas kawasan.

Pemberlakuan MEA tahun 2015 menyebabkan lalu lintas perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara menjadi tanpa kendala. MEA merupakan wujud kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi kurang lebih 500 juta penduduknya. Perdagangan bebas dapat diartikan tidak ada hambatan tarif (bea masuk 0-5%) maupun hambatan non-tarif bagi negara-negara anggota ASEAN.

Negara-negara ASEAN telah menyepakati sektor-sektor prioritas menuju momen tersebut. Ketika berlangsung ASEAN Summit ke-9 tahun 2003 ditetapkan 11 *Priority Integration Sectors* (PIS). Namun pada tahun 2006 PIS yang ditetapkan berkembang menjadi 12 yang dibagi dalam dua bagian yaitu tujuh sektor barang industri dan lima sektor jasa. Tujuh sektor barang industri terdiri atas produk berbasis pertanian, elektronik, perikanan, produk berbasis karet, tekstil, otomotif, dan produk berbasis kayu. Sedangkan lima sektor jasa tersebut adalah transportasi udara, e-ASEAN, pelayanan kesehatan, turisme dan jasa logistik.

Dalam menghadapi persaingan yang teramat ketat selama MEA ini, negara-negara ASEAN harus mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang terampil, cerdas, dan kompetitif.



c. Pembangunan Bandara *New Yogyakarta International Airport* (NYIA)

Bandara *New Yogyakarta International Airport* (NYIA) akan dibangun dengan konsep bandara internasional modern dengan fasilitas intermoda. Sarana intermoda yang dimaksud yakni lajur khusus kereta api yang bisa mengakses langsung area bandara. Selain itu, bandara ini akan memiliki landasan pacu (*runway*) minimal 3.250 meter sehingga pesawat jet berbadan besar dapat mendarat dan tinggal landas. Dengan demikian, terbuka luas peluang untuk membuka penerbangan langsung (*direct flight*) baik ke Asia maupun Eropa. Dengan masuknya pesawat besar sangat memungkinkan menjadikan DIY sebagai kawasan embarkasi haji baru dengan jalur langsung ke tanah suci. Tambahan pula, pembangunan infrastruktur pendukung dan peluang masuknya investasi dapat menyerap tenaga kerja masyarakat. Bandara yang ditarget bisa menampung 15 juta penumpang tiap tahunnya ini diperkirakan akan mulai beroperasi pada tahun 2020.

d. Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS)

Sejalan dengan Visi Gubernur 2017–2022 yaitu Menyongsong "Abad Samudera Hindia" untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja. Dengan demikian direncanakan peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas untuk mendukung kawasan strategis pantai selatan, salah satunya dengan pembangunan JJLS.

Berdasarkan Kepmen PU Nomor 631 Tahun 2009 tentang Status Jalan Nasional Bukan Tol, JJLS merupakan jaringan jalan nasional strategis belum tersambung yang memiliki panjang 125,125 Km dengan rincian Kabupaten Kulon Progo sepanjang 28,840 km, Kabupaten Bantul sepanjang 20,195 km, dan Kabupaten Gunungkidul sepanjang 76,090 km. Dalam pelaksanaan pengembangan Jalur Jalan Lintas Selatan ini biaya fisik konstruksi didanai melalui alokasi dana APBN. Pembebasan lahan pada tahun 2016-2017 (dimulai dari Samas ke timur) menggunakan dana keistimewaan, sedangkan pemerintah kabupaten terlibat dalam proses sosialisasi. Realisasi rencana pembangunan JJLS di Kabupaten Bantul yaitu sepanjang 16,58 km, terdiri dari ruas Pandansimo-Samas terbangun sepanjang 6,28 km, ruas Samas-Kretek terbangun sepanjang 5 km, ruas Kretek-Girijati direncanakan akan dibangun sepanjang 5,3 km pada



tahun 2018-2019 melalui APBN, rencana pembangunan Jembatan Srandakan III, dan jembatan Kretek II direncanakan dibangun pada tahun 2018-2019.

e. Pembangunan Jogja *Outer Ring Road* (JORR)

Pembangunan jalan lingkar luar Yogyakarta atau Jogja *Outer Ring Road* (JORR) direncanakan untuk mengurangi arus lalu lintas di jalan lingkar (*ring road*) Yogyakarta yang semakin padat. Panjang JORR direncanakan 113,413 km dan lebar jalan 40 m, melewati tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Sleman, Kulonprogo, dan Bantul. Rute JORR yang melewati Kabupaten Bantul sepanjang 47,48 km, terdiri dari rute Sentolo-Imogiri (22 km), rute Imogiri-Piyungan (16,325 km), dan rute Piyungan-Kalasan (9,155 km). Studi kelayakan Rencana Pembangunan JORR telah dilakukan pada tahun 2016, sedangkan AMDAL disusun pada tahun 2017. Untuk mendukung rencana pembangunan tersebut diharapkan *sharing* dari pemerintah kabupaten berupa sosialisasi maupun pembebasan lahan.

f. *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Salah satu agenda pembangunan dunia yang dapat menjadi referensi bagi perumusan isu strategis RPJMD Kabupaten Bantul adalah *Sustainable Development Goals* (SDGs). *Sustainable Development Goals* (SDGs) menggantikan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang tidak lagi berlaku terhitung mulai akhir tahun 2015. SDGs aktif mulai tahun 2015 hingga tahun 2030.

Tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah seperangkat target yang berhubungan dengan pengembangan internasional di masa mendatang. Target-target ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dipromosikan sebagai Tujuan Global untuk Pembangunan yang Berkelanjutan.

Ada 17 tujuan dan 169 target spesifik untuk tujuan-tujuan tersebut. Pada bulan Agustus 2015, 193 negara menyepakati 17 tujuan berikut ini:

1. Kemiskinan - Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di semua tempat.
2. Kelaparan - Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
3. Kesehatan - Memastikan hidup yang sehat dan menggalakkan kesejahteraan untuk semua usia.



4. Pendidikan - Memastikan pendidikan berkualitas yang terbuka dan setara serta menggalakkan kesempatan untuk belajar sepanjang umur hidup pada semua orang.
5. Wanita - Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua wanita dan anak perempuan.
6. Air - Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkesinambungan atas air dan sanitasi untuk semua orang.
7. Energi - Memastikan akses pada energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern bagi semua orang.
8. Ekonomi - Menggalakkan perkembangan ekonomi yang berkesinambungan, terbuka, dan berkelanjutan, lapangan kerja yang utuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9. Infrastruktur - Membangun infrastruktur yang tahan lama, menggalakkan industrialisasi yang berkesinambungan dan terbuka, serta mendorong inovasi.
10. Kesenjangan - Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara.
11. Komunitas - Membuat kota dan pemukiman manusia terbuka, aman, tahan lama, serta berkesinambungan.
12. Konsumsi - Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi yang berkesinambungan.
13. Iklim - Mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan pengaruhnya.
14. Lautan yang berkesinambungan - Melestarikan dan menggunakan samudra, laut, dan sumber-sumber daya maritim secara berkesinambungan untuk pengembangan yang lestari.
15. Ekosistem - Melindungi, mengembalikan, dan menggalakkan penggunaan yang lestari atas ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkesinambungan, memerangi penggundulan hutan, dan memperlambat serta membalikkan degradasi tanah serta memperlambat hilangnya keragaman hayati.
16. Institusi - Menggalakkan masyarakat yang damai dan terbuka untuk pengembangan yang lestari, memberikan akses pada keadilan untuk semua orang dan membangun institusi yang efektif, bertanggung jawab, serta terbuka di semua tingkatan.



17. Kemitraan - Memperkuat cara-cara penerapan dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pengembangan yang berkesinambungan.

Dalam kaitannya dengan penyusunan isu strategis Kabupaten Bantul, sebagian atau seluruh tujuan SDGs dapat dipilih sebagai tujuan yang diberi perhatian besar dalam pembangunan Kabupaten Bantul 3 (tiga) tahun mendatang. Hal ini dapat diawali dengan menjadikan isu SDGs sebagai isu strategis Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul, dengan catatan telah dilakukan kajian mengenai relevansi antara isu SDGs dengan permasalahan *riil* di lapangan.

Beberapa isu terkait SDGs, capaian isu strategis SDGs Kabupaten Bantul ada yang sudah tercapai dan belum tercapai, berikut faktanya:

- Tujuan pertama dalam sasaran Global SDGs dimana Pada Tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah *proporsi* laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. Tingkat kemiskinan Kabupaten Bantul tahun 2017 masih diatas DIY (13,02%). Tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Bantul sejalan dengan ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah dimana wilayah Kabupaten Bantul masih didominasi wilayah pedesaan yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi.
- Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator yang mendapatkan perhatian di Kabupaten Bantul. AKI menjadi indikator dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) juga masih fokus dalam upaya penurunan AKI. Komitmen global menyepakati dalam SDGs untuk mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Sedangkan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Bantul pada tahun 2017 sebesar 72,8 per 100.000 kelahiran hidup (9 kasus kematian ibu).
- Ketersediaan air bersih dan sanitasi, yakni menjamin ketersediaan serta *pengelolaan* air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Akses air bersih penduduk Kabupaten Bantul mencapai 107,12, hal ini dicapai karena sebagian warga memiliki akses air bersih dari 2 atau lebih sumber air, misal dari air bersih perpipaan dan sumur gali. Sedangkan, akses jamban tahun 2017 menurut data Dinas Kesehatan sebesar 100% mengalami



peningkatan dibandingkan tahun 2016 sebesar 97,0%, hal ini berarti semua masyarakat Kabupaten Bantul sudah dapat mengakses jamban.

g. Pelestarian Gumuk Pasir

Gumuk Pasir terbentuk oleh endapan butiran-butiran pasir halus yang terbawa oleh angin. Di DIY, pembentukan gumuk pasir terjadi akibat material vulkanik Gunung Merapi berupa batuan yang pecah menjadi kerikil dan akhirnya menjadi butiran pasir, terbawa angin menuju pantai dan tertahan oleh ombak dan angin yang sangat kuat dari Samudera Hindia sehingga menghasilkan gumuk pasir yang disebut *barchan*, yang berbentuk melengkung mirip bulan sabit. Gumuk pasir tipe *barchan* yang ada di Parangtritis saat ini adalah salah satu dari hanya dua di dunia. Adapun satunya berada di negara Mexico.

Gumuk pasir di Parangtritis telah ditetapkan sebagai *Geo Heritage* oleh Badan Geologi Nasional. Kondisi saat ini menurut beberapa pakar ekologi, sedang terancam rusak bahkan dapat punah. Hal ini ditengarai akibat dari aktivitas manusia yang dilakukan di dekat kawasan gumuk, seperti pembangunan tambak, perluasan lahan pertanian, dan penanaman pohon cemara udang yang berpotensi menahan angin pembentuk gumuk. Diperlukan upaya-upaya strategis dan sinergis untuk melindungi dan melestarikan *Geo Heritage* Gumuk Pasir Parangtritis.

h. Alih Fungsi Lahan Pertanian

Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian merupakan ancaman besar terhadap ketahanan pangan. Pada tahun 2015 telah terjadi alih fungsi lahan seluas 50 ha. Sesuai dengan UU No 41 Tahun 2009 tentang Pelindungan lahan Pertanian Pangan berkelanjutan yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah DIY No. 10 Tahun 2011 Tentang Pelindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mengamanatkan agar Pemerintah melakukan Perlindungan terhadap lahan-lahan produktif dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan. Dalam Perda telah ditetapkan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bantul paling kurang 13.000 ha. Beberapa kebijakan telah dilaksanakan untuk mengendalikan laju alih fungsi lahan antara lain:

- 1) Moratorium Perumahan di Kecamatan Banguntapan, Kasihan, Sewon, Bantul dan Pleret.



- 2) Pelarangan alih fungsi lahan desa.
- 3) Pemetaan rencana kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

4.2.2. Kebijakan Provinsi

a. RPJMD DIY Tahun 2017-2022¹

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022, isu strategis dalam pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Tingginya Angka Kemiskinan

DIY mempunyai komitmen untuk menurunkan tingkat kemiskinan dalam rangka mendukung sasaran Tujuan pertama dalam sasaran Global SDGs/TPB dimana Pada Tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasioanal. Tingkat kemiskinan pada periode 2010 sampai dengan September 2016 cenderung mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin 2010 sebesar 16,83 persen, turun menjadi 13,02 persen pada Maret 2017. Namun demikian, jika dibandingkan dengan kemiskinan nasional, tingkat kemiskinan DIY memang masih lebih tinggi. Dalam sasaran pengurangan kemiskinan pada RPJMN 2015-2019, target tingkat kemiskinan DIY tahun 2019 adalah 7%-8%. Dengan kondisi DIY capaian saat ini per September 2017 sebesar 12.36 %, ditarget dalam RAD SDGs/TPB DIY secara bertahap diupayakan diturunkan dengan target per tahun kurang lebih 1% pertahun sehingga diharapkan pada 5 (lima) tahun mendatang Tahun 2022 turun menjadi 7 %.

2. Tingginya Ketimpangan Wilayah

Isu strategis terkait Ketimpangan Wilayah mendapatkan perhatian di dalam beberapa tujuan dalam SDGs/TPB. Adapun yang secara khusus berkaitan dengan ketimpangan wilayah yaitu Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan

^{*)}Perda DIY Nomor 3 Tahun 2018 tentang RPJMD DIY Tahun 2017-2022 halaman IV-111 s/d IV-121



kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang. Sasaran dalam tujuan ini antara lain meliputi:

- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi,
- Meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita per tahun,
- Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun,
- Menurunnya koefisien gini, dan
- Menurunnya tingkat kemiskinan.

3. Pencemaran, Kerusakan Alam, dan Resiko Bencana Alam

Isu terkait lingkungan yaitu:

- Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua,
- Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan,
- Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan,
- Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya,
- Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan, dan
- Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

4. Belum Optimalnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tingginya Alih Fungsi Lahan Pertanian

Isu terkait belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan tingginya alih fungsi lahan pertanian di DIY juga telah menjadi isu atau target sasaran dalam tujuan SDGs/TPB, yaitu:

- Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan



- Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan.

Beberapa isu strategis terkait pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang antara lain masih maraknya alih fungsi lahan, yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan. Alih fungsi lahan tersebut pada umumnya adalah kawasan pertanian menjadi non pertanian. Alih fungsi lahan pertanian yang tinggi dikarenakan melonjaknya kebutuhan akan ruang untuk permukiman dan sarana pendukung kehidupan masyarakat. Sementara di sisi lain, upaya perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan masih belum optimal dengan belum ditetapkannya lahan dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

5. Penyediaan Infrastruktur Dasar di Kawasan Pesisir Selatan Belum Optimal

Infrastruktur strategis merupakan prasarana yang digunakan untuk mengembangkan atau menunjang proses perbaikan kondisi di suatu wilayah, yang dalam hal ini, wilayah yang dimaksud adalah kawasan pesisir selatan DIY. Penyediaan infrastruktur strategis di kawasan selatan bertujuan untuk menurunkan ketimpangan antar wilayah terutama pada penurunan penyimpangan PDRB di kawasan selatan terhadap PDRB di kawasan Utara (Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta), serta penurunan angka kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu faktor yang dapat memicu perkembangan wilayah adalah konektivitas. Dengan adanya konektivitas suatu wilayah akan mudah untuk berinteraksi dengan wilayah tersebut maupun antar wilayah lainnya. Konektivitas dapat menghubungkan pusat-pusat sub wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan guna meningkatkan perkembangan wilayah. Adanya konektivitas ini memerlukan dukungan infrastruktur strategis diantaranya jalan, bandara, dan jalur kereta api penghubung. Infrastruktur jalan dan konektivitas tidak dapat dipisahkan dalam perannya mempengaruhi perkembangan wilayah.



6. Pengembangan Pendidikan Karakter dan Pendidikan Vokasi

Terkait isu pengembangan pendidikan, dalam SDGs/TPB DIY telah menyelaraskan sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam dokumen RAN, yaitu: Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Adapun sasaran-sasaran akhir SDGs tahun 2030 sebagai berikut:

- Menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.
- Menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.
- Menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.
- Menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.

7. Pelestarian Budaya Baik Benda Maupun Tak Benda

Sebagaimana tercantum dalam Visi RPJP 2005-2025, kebudayaan menjadi salah satu pilar utama pembangunan. Upaya pembangunan kebudayaan semakin intens terutama se usai penetapan Undang-Undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Semakin kuatnya upaya pemeliharaan dan pengembangan budaya benda maupun tak benda menghadapi ancaman kerusakan sejumlah cagar budaya dan warisan budaya yang dipengaruhi oleh dinamika perkembangan perkotaan dan faktor alamiah. Sementara itu, dalam aspek tak benda, sejumlah warisan budaya tak benda yang bersumber dari nilai-nilai luhur budaya, adat dan



tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra telah mendapatkan pengakuan warisan budaya tak benda nasional.

8. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (*Good Governance*)

Terkait dengan isu tata kelola pemerintahan telah menjadi bahasan dalam SDG's/TPB yaitu meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan. Pemerintah Daerah perlu menjaga komitmen yang kuat untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemda DIY serta perbaikan terus menerus dalam akuntabilitas kinerja pembangunan.

9. Pertumbuhan Ekonomi yang Belum Inklusif

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dalam TPB merupakan pilar tersendiri yaitu pilar ekonomi, terdiri dari 4 (empat) tujuan yaitu:

- Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
- Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.

Paradigma pembangunan ekonomi mengalami pergeseran, dari yang mengejar angka pertumbuhan meningkat menjadi pertumbuhan yang bersifat inklusif. Pertumbuhan yang inklusif dapat diartikan sebagai suatu proses pertumbuhan yang menjamin kesetaraan akses terhadap peluang ekonomi bagi semua segmen sosial tanpa melihat keadaan masing-masing individu. Dengan demikian, pertumbuhan inklusif akan memberi rakyat miskin sebuah titik awal yang memungkinkan mereka untuk menikmati pertumbuhan ekonomi. Strategi pencapaian pertumbuhan yang inklusif dapat dicapai melalui beberapa cara, antara lain percepatan pertumbuhan yang dibarengi dengan pemerataan pertumbuhan, menghilangkan ketimpangan dengan menjamin kesetaraan terhadap peluang, peningkatan



jumlah tenaga kerja produktif, penguatan kapasitas produksi, dan juga mewujudkan sistem perlindungan sosial.

- Pertumbuhan inklusif diukur melalui *Inclusive Growth Index* (IGI) yang memiliki lima dimensi yaitu (1) dimensi pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja produktif, dan infrastruktur ekonomi, (2) dimensi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, (3) dimensi kesetaraan gender, (4) dimensi kapabilitas dan (5) dimensi perlindungan sosial. Berdasarkan pengukuran indeks IGI diperoleh dimensi infrastruktur ekonomi, kesetaraan gender dan kapabilitas manusia mencapai indeks kepuasan yang relatif tinggi. Sementara itu, dimensi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masih relatif rendah pencapaiannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan belum diikuti dengan penurunan kesenjangan baik distribusi pendapatan antar individu maupun distribusi pendapatan antar Kabupaten/kota.

b. Rencana Tata Ruang dan Keistimewaan DIY

Dalam perkembangannya kebijakan pengembangan kawasan strategis di Kabupaten Bantul juga mengacu pada kawasan Strategis dalam RTRW DIY dan juga Keistimewaan DIY.

Rencana pola ruang keistimewaan disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pola ruang keistimewaan ini menyangkut keberadaan tanah Kasultanan, tanah Kadipaten, serta satuan ruang lainnya yang memiliki nilai keistimewaan. Pengelolaan tanah Kasultanan, tanah Kadipaten, serta satuan ruang keistimewaan lainnya.

Kawasan strategis RTRW dan Keistimewaan DIY terkait dengan wilayah Kabupaten Bantul, antara lain:

- a) Pengembangan kawasan strategis koridor:
 - 1) Kawasan Koridor Temon – Prambanan.
 - 2) Kawasan Koridor Tempel - Parangtritis.
 - 3) Kawasan Pantai Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b) Kawasan Strategis Kepentingan Sosial dan Budaya



- 1) Nitiprayan, Pleret, Imogiri, Parangkusumo.
 - 2) Ekologis budaya selatan.
 - 3) Gumuk pasir Parangtritis.
- c) Kawasan Strategis Kepentingan Daya Dukung Lingkungan Hidup
Kawasan Bentang Alam Karst (Kec. Dlingo dan Kec. Imogiri)

4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah Lainnya

Di dalam rangka penyelarasan pelaksanaan pembangunan antar daerah dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perencanaan pembangunan Kabupaten Bantul meninjau kebijakan pembangunan daerah sekitarnya melalui dokumen RPJMD masing-masing kabupaten/kota.

Berikut ini disajikan telaahan RPJMD beberapa kabupaten/kota tetangga Kabupaten Bantul.

Tabel 4.2.
Identifikasi RPJMD Daerah Lain

No	Nama Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait
1	Kota Yogyakarta	2012-2016	<ol style="list-style-type: none">1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas3. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan gerakan Segoro Amarto4. Mewujudkan daya saing daerah yang kuat
		2017-2022	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta3. Memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan6. Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman7. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih
2	Kabupaten Sleman	2016 - 2021	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan <i>e-govt</i> yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.2. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat.



No	Nama Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait
			<ol style="list-style-type: none">3. Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, dan penanggulangan kemiskinan.4. Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan.5. Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan <i>gender</i> yang proporsional.
3	Kabupaten Kulon Progo	2017-2022	<ol style="list-style-type: none">1. Mewujudkan Sumberdaya Manusia Berkualitas Tinggi dan Berakhlak Mulia melalui Peningkatan Kemandirian, Kompetensi, Ketrampilan, Etos Kerja, Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan dan Kualitas Keagamaan.2. Mewujudkan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintahan yang berorientasi pada Prinsip-Prinsip <i>Clean Government</i> dan <i>Good Governance</i>.3. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah yang berbasis pada Pertanian dalam arti luas, Industri dan Pariwisata yang berdaya saing dan Berkelanjutan bertumpu pada Pemberdayaan Masyarakat.4. Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Wilayah.5. Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan secara Optimal dan Berkelanjutan6. Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban melalui Kepastian, Perlindungan dan Penegakan Hukum.
4	Kabupaten Gunungkidul	2016 - 2021	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>).2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.3. Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional.4. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah.5. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif.6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan.



4.2.4. Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bantul

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul 2006-2025

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025.

Visi Kabupaten Bantul 2006-2025, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera, Demokratis, dan Agamis.**

Dalam mewujudkan visi tersebut, tahapan dan skala prioritas lima tahun ketiga dalam RPJPD adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Prioritas Lima Tahun Tahap Ketiga RPJPD di Kabupaten Bantul 2006-2025

Penekanan Pada Lima Tahun Ketiga: Pencapaian daya saing kompetitif daerah yang berlandaskan keunggulan SDM, dan optimalisasi pengelolaan SDA, berbasis IPTEK.		
MISI	TAHAP III	PRIORITAS TAHAP III
1. Mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin dengan memanfaatkan sumbu daya lokal, berwawasan lingkungan, dan menitikberatkan pengurangan risiko bencana, serta berdasarkan pada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	Peningkatan kualitas pendidikan, aksesibilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, serta pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu.	a) Peningkatan pendidikan yang bermutu dan terjangkau di semua jenjang, peningkatan relevansi daya saing dan pencitraan tata kelola pendidikan. b) Pemenuhan sekolah berkualitas melalui penyediaan/pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional, dan pemenuhan fasilitas pendidikan. c) Peningkatan kuantitas dan kualitas siswa pada sekolah kejuruan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dan menciptakan lapangan pekerjaan. d) Pengembangan pendidikan non formal sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi e) Peningkatan kerja sama antar lembaga pendidikan, lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia usaha, maupun dunia industri dalam peningkatan mutu pendidikan
	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, aksesibilitas, dan partisipasi masyarakat dalam kesehatan, serta meningkatnya perluasan pelayanan kesehatan	a) Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, layak dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. b) Peningkatan budaya hidup sehat dan bersih. c) Peningkatan kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak. d) Peningkatan status gizi masyarakat dengan cara menjalankan pola hidup bersih dan sehat melalui upaya promotif dan preventif secara terus-menerus



Penekanan Pada Lima Tahun Ketiga:

Pencapaian daya saing kompetitif daerah yang berlandaskan keunggulan SDM, dan optimalisasi pengelolaan SDA, berbasis IPTEK.

MISI	TAHAP III	PRIORITAS TAHAP III
		terhadap berbagai penyakit dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. e) Peningkatan pencegahan gangguan kesehatan, baik karena penyakit menular maupun tidak menular
	Peningkatan perluasan kesempatan kerja, kualitas tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja	a) Penciptaan peluang kesempatan kerja dan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat. b) Peningkatan sarana permodalan. c) Peningkatan kerjasama antar daerah di tingkat nasional termasuk transmigrasi. d) Peningkatan etos masyarakat berwirausaha dengan dukungan informasi peluang usaha. e) Peningkatan pelatihan ketrampilan. f) Perlindungan dan pengawasan terhadap tenaga kerja dan pengusaha. g) Peningkatan kesehatan pekerja dan pelaksanaan hubungan industri dan pengawasan lingkungan yang kondusif
	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan guna menghadapi perdagangan bebas negara-negara maju sehingga pendapatan perkapita pada akhir periode pembangunan jangka panjang mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan kabupaten maju di Indonesia	a) Pengembangan unit-unit usaha industri kecil dan kerajinan rakyat yang potensial. b) Peningkatan penyiapan dan penggunaan bahan baku lokal. c) Peningkatan kualitas produk dan jangkauan pemasaran. d) Peningkatan kerjasama kemitraan dengan pihak-pihak yang berkompetensi baik dalam negeri maupun luar negeri. e) Pengembangan sistem industri, dalam lingkup mikro, kecil dan menengah, serta koperasi yang ramah lingkungan dan berbasis keluarga dan teknologi. f) Pengembangan kawasan industri kreatif yang memadai. g) Peningkatan produktivitas pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis dan agroindustri, guna menjamin ketersediaan pangan dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pengangguran. h) Peningkatan kepariwisataan dengan memanfaatkan keberagaman pesona keindahan alam, budaya dan potensi daerah lainnya. i) Pengembangan kelembagaan ekonomi guna menciptakan regulasi dan perizinan yang efisien dan efektif
	Terwujudnya jaringan infrastruktur yang andal sehingga dapat	a) Pemenuhan dan pemerataan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah dalam rangka

**Penekanan Pada Lima Tahun Ketiga:****Pencapaian daya saing kompetitif daerah yang berlandaskan keunggulan SDM, dan optimalisasi pengelolaan SDA, berbasis IPTEK.**

MISI	TAHAP III	PRIORITAS TAHAP III
	Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru/ kawasan strategis	peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. b) Penyediaan fasilitas umum berupa prasarana dan sarana transportasi, melalui pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan kondisi jalan dan jembatan yang sudah ada untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah. c) Peningkatan prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi guna mendukung aktivitas produksi, serta memenuhi kebutuhan prasarana dasar, melalui konservasi, pengembangan dan pengendalian daya rusak air. d) Pengembangan teknologi informasi ke seluruh wilayah.
	Terwujudnya keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam suatu sistem wilayah pembangunan yang berkelanjutan	a) Penataan ruang kawasan strategis, penyusunan <i>zone regulation</i> dan Rencana Penataan Permukiman (RPP). b) Peningkatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Kepariwisata dengan memanfaatkan. c) Pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam sistem wilayah pembangunan yang berkelanjutan. d) Peningkatan tata ruang melalui pemulihan kawasan lindung, pengembangan kawasan budidaya dan penetapan insentif disinentif
	Peningkatan pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup yang tercermin oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan industri dan ekonomi secara serasi dan seimbang; keberagaman pesona keindahan alam, budaya, dan potensi daerah lainnya	a) Peningkatan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan penegakan hukum lingkungan. b) Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui rehabilitasi lahan kritis dan terlantar serta pengembalian fungsi kawasan lindung. c) Peningkatan kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta mengurangi dampak bencana alam. d) Pemanfaatan energi terbarukan yang ramah lingkungan
	Pengurangan risiko bencana melalui penataan permukiman dan merelokasi penduduk dari wilayah rawan bencana.	a) Pembangunan infrastruktur permukiman dan relokasi penduduk dari wilayah rawan bencana. b) Peningkatan kelembagaan masyarakat. c) Peningkatan kemampuan seluruh masyarakat, baik perempuan, anak dan usia lanjut dalam mengenali aspek bencana. d) Peningkatan sarana prasarana sistem

**Penekanan Pada Lima Tahun Ketiga:****Pencapaian daya saing kompetitif daerah yang berlandaskan keunggulan SDM, dan optimalisasi pengelolaan SDA, berbasis IPTEK.**

MISI	TAHAP III	PRIORITAS TAHAP III
	Berkurangnya Penyandang masalah kesejahteraan sosial, tercapainya penduduk tumbuh seimbang, serta peningkatan peran perempuan dalam pembangunan	peringatan dini bencana a) Mewujudkan kesetaraan <i>gender</i> di lapisan masyarakat, organisasi, dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. b) Peningkatan peran kelompok kegiatan sosial perempuan dan unit-unit usaha ekonomi produktif. c) Peningkatan kemampuan perempuan dan kelompok rentan dalam mengenali dan memenuhi kebutuhan pengembangan diri. d) Jaminan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah Kesehatan Reproduksi (kespro) serta kelangsungan hidup ibu anak. e) Peningkatan sarana dan prasarana panti sosial guna menampung penyandang masalah sosial
	Penanganan olah raga, peningkatan prestasi olah raga dan kualitas generasi muda	a) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang olah raga. b) Pengembangan budaya olah raga bagi masyarakat. c) Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemberdayaan pemuda sebagai subyek pembangunan, melalui pengembangan lembaga kepemudaan yang berwawasan kebangsaan.
	Mantapnya Karakter masyarakat yang berbudaya, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, berkeperibadian Indonesia dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleransi, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dan dinamis	a) Pembentukan suatu tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis, selaras, serasi dan seimbang dalam suatu suasana yang agamis dan demokratis. b) Pemantapan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan daerah, membina akhlak mulia dan memupuk etos kerja. c) Peningkatan kerukunan hidup beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya, toleransi dan harmonisasi antar kelompok masyarakat
2. Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang empatik dan bertanggung jawab,	Peningkatan Kapasitas perangkat daerah dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah secara efisien, efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel	a) Peningkatan kinerja, kapasitas dan profesionalisme aparatur serta lembaga pemerintah. b) Penerapan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel. c) Mewujudkan inventarisasi, pendayagunaan dan manajemen aset-aset daerah secara efektif, efisien dan produktif.

**Penekanan Pada Lima Tahun Ketiga:****Pencapaian daya saing kompetitif daerah yang berlandaskan keunggulan SDM, dan optimalisasi pengelolaan SDA, berbasis IPTEK.**

MISI	TAHAP III	PRIORITAS TAHAP III
		d) Peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah dan peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan menuju kemandirian daerah. e) Mewujudkan kepastian, perlindungan, penegakan dan pelayanan hukum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, teratur, lancar dan berdaya saing global. f) Pemantapan tata kelola pemerintahan yang empatik.
	Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.	a) Penerapan Teknologi informasi sampai tingkat desa dalam pelayanan publik. b) Pemantapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga tercipta kepuasan masyarakat. c) Peningkatan mutu sarana dan prasarana publik.
	Peningkatan ketertiban masyarakat.	a) Pemenuhan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan. b) Pemantapan manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana dalam kehidupan bermasyarakat
	Pemantapan kesadaran masyarakat dan aparat, membudayakan prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM melalui pemasyarakatan dan pendidikan HAM	

b. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul 2010-2030 disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011. Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul 2010-2030 kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:

- 1) Perwujudan kawasan perkotaan dan perdesaan yang terpadu, dengan mempertahankan Bantul sebagai kawasan perdesaan yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- 2) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, jaringan sumber daya air, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan yang terpadu, adil, dan merata di seluruh wilayah kabupaten.



Strategi perwujudan kawasan perkotaan dan perdesaan yang terpadu, dengan mempertahankan Bantul sebagai kawasan perdesaan yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi:

- 1) Menjaga keterkaitan kawasan dalam kota, antar kota, dan antara kota dengan desa;
- 2) Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya;
- 3) Menjadikan kawasan perkotaan sebagai pendorong dan gerbang ekonomi wilayah;
- 4) Mengembangkan pertanian menuju pertanian pangan berkelanjutan; dan
- 5) Mempertahankan dan mengembangkan pusat pertumbuhan di kawasan yang telah memberikan pelayanan secara optimal.

Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, jaringan sumber daya air, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan yang terpadu, adil, dan merata di seluruh wilayah meliputi:

- a. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat maupun udara serta mendukung industri perdagangan, dan jasa;
- b. Meningkatkan jaringan air baku untuk perumahan dan permukiman serta untuk mendorong peningkatan hasil pertanian;
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan laut untuk mengembangkan potensi kelautan Bantul;
- d. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi dalam memenuhi kebutuhan informasi;
- e. Meningkatkan jaringan energi listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal; dan
- f. Meningkatkan jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan pengelolaan lingkungan.

Dalam RTRW Bantul telah ditetapkan beberapa kawasan strategis kabupaten, yaitu:

- a. Kawasan Strategis Ekonomi Kabupaten, terdiri dari:



- a) Kawasan Strategis Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY);
- b) Kawasan Strategis Bantul Kota Mandiri (BKM);
- c) Kawasan Strategis Pantai Selatan, Pengembangan Pesisir dan Pengelolaan
- d) Hasil Laut Pantai Depok, Pantai Samas, Pantai Kuwaru, dan Pantai Pandansimo;
- e) Kawasan Strategis Industri Sedayu; dan
- f) Kawasan Strategis Industri Piyungan.
- b. Kawasan Strategis Sosio-Kultural Kabupaten yaitu Kawasan Strategis Desa Wisata dan Kerajinan:
 - a) Gabusan –Manding – Tembi (GMT) dan
 - b) Kasongan – Jipangan – Gendeng – Lemahdadi (Kajigelem).
- c. Kawasan Strategis Lingkungan Hidup Kabupaten, yaitu:
 - a) Kawasan Strategis Agrowisata di Kecamatan Dlingo dan Agropolitan di Kecamatan Sanden, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pundong, Kecamatan Imogiri, dan Kecamatan Dlingo; dan
 - b) Kawasan Strategis Gumuk Pasir Parangtritis yang berfungsi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian.

Rencana pola ruang Kabupaten Bantul juga mengikuti arahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali serta Peraturan Daerah DIY tentang Rencana Tata Ruang DIY. Berdasarkan peraturan tersebut maka rencana pola ruang lindung Kabupaten Bantul terdiri atas kawasan hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, kawasan lindung geologi, serta kawasan rawan bencana alam.

Adapun rencana pola ruang budidaya Kabupaten Bantul terdiri atas kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan budidaya lainnya.



Pengembangan kawasan industri menjadi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan penyerapan tenaga kerja. Percepatan perwujudan kawasan industri menjadi sangat mendesak dengan dukungan pembangunan infrastruktur penunjang kawasan seperti akses jalan.

Sejalan dengan arahan rencana struktur dan pola ruang yang ada dalam RTRW Bantul, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengarahkan Pantai Selatan DIY merupakan halaman depan provinsi. Kabupaten Bantul merupakan salah satu daerah yang mempunyai wilayah pantai sangat potensial untuk pengembangan pariwisata, pengembangan energi terbarukan, perikanan, dan konservasi alam. Untuk mendukung pengembangan sektor-sektor tersebut, perlu didukung dengan penataan kawasan dan pembangunan infrastruktur seperti jalur Pansela.

Dalam mendukung *grand design* dan *roadmap* kawasan Pantai Selatan sebagai halaman muka DIY, Pemerintah Kabupaten Bantul telah menyiapkan berbagai langkah sebagai berikut:

1. Pengembangan kawasan pendukung JJLS,
2. Penetapan kawasan peruntukan industri di Kecamatan Sedayu dan Kecamatan Pajangan.
3. Penyelamatan ekosistem gumuk pasir.
4. Pengembangan sentra-sentra industri potensial.
5. Peningkatan daya saing IKM.
6. Pengembangan destinasi wisata.
7. Pengembangan perikanan tangkap dan budidaya.
8. Pengembangan pertanian lahan pasir.

c. Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Kartamantul (Yogyakarta, Sleman, Bantul)

Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Kartamantul (Yogyakarta, Sleman, Bantul) dibentuk melalui SK Bersama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman dan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor: 583b/B/SKB/Bt/1996, 310/Kep/KDH/1996/1169 Tahun 1996 tentang Kerjasama Pembangunan Antar Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Pengelolaan Prasarana Perkotaan. Untuk memantapkan kerja sama



antar daerah yang dijalin, maka dikeluarkan Surat Keputusan Bersama Bupati Bantul, Bupati Sleman dan Walikota Yogyakarta No.152a 02/SKB.KDH/A/2004, Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Bupati Bantul, Bupati Sleman, dan Walikota Yogyakarta No.04/Pem/RT/2001, 38/Kep.KHP/2001, Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Sekretariat Bersama Pengelola Prasarana dan Sarana Perkotaan Antar Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.

Sekretariat Bersama dibentuk sebagai forum fasilitasi, perencana dan mediasi untuk memudahkan koordinasi antar tiga daerah dalam menentukan penyediaan pelayanan yang terpilih. Pelayanan terpilih mencakup 6 (enam) hal, yaitu: pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, penyediaan air bersih, saluran pembuangan, jalan dan transportasi.

Kartamantul memiliki visi: "Menjadi lembaga yang menjembatani terwujudnya kerjasama yang setara, adil, partisipatif, transparan dan demokratis, untuk mewujudkan perkotaan yang nyaman, indah dan sehat yang didukung oleh sarana – prasarana dan pelayanan yang memadai, kesadaran dan peran serta masyarakat yang tinggi".

Dalam visi ini, ketiga daerah berusaha untuk mewadahi berbagai kepentingan untuk ikut berperan serta dalam pembangunan antar wilayah. Setiap daerah memiliki potensi dan tanggung jawab yang sama dalam pengambilan keputusan sehingga mengurangi kemungkinan timbulnya ketidakpuasan.

Sedangkan Misinya adalah:

- a) Melakukan negosiasi untuk mendapatkan hasil yang adil,
- b) Melakukan mediasi penyelesaian permasalahan,
- c) Melakukan koordinasi manajemen dan implementasi,
- d) Melakukan fasilitasi proses pengambilan keputusan,
- e) Membangun jaringan kerja yang kuat,
- f) Memberikan inisiasi perubahan, dan
- g) Memberikan rekomendasi kebijakan.

Berdasarkan visi dan misinya, Kartamantul bertujuan:

- a) Menyeimbangkan dan mengharmonisasikan pengelolaan dan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan di tiga pemerintah daerah,



- b) Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan prasarana dan sarana di Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta, dan
- c) Meningkatkan penggunaan yang efisien dari sumber daya ketiga pemerintah daerah dan untuk mengoptimalkan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik di Metropolitan Yogyakarta.

Terdapat tiga aspek utama yang terkandung dalam tujuan Kartamantul, yakni: keharmonisan, koordinasi, dan efisiensi. Aspek-aspek tersebut menjadi jiwa dari setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Kartamantul.

Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut diatas adalah dengan meningkatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan di wilayah yang berbatasan. Artinya, Kartamantul tidak menafikan proses pembangunan yang terjadi di setiap daerah anggotanya dan justru menjadikan pijakan bagi pengembangan program pembangunan secara bersama-sama.

4.2.5. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Bantul

KLHS merupakan serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau KRP (Kebijakan, Rencana, dan Program). Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Daerah adalah proses membuat dan melaksanakan KLHS yang dilakukan pada penyusunan atau pada saat evaluasi RPJPD; RPJMD; dan/atau KRP yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup yang termuat dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Proses penyusunan KLHS RPJMD dimulai dengan melakukan identifikasi pemangku kepentingan untuk pemetaan pemangku kepentingan, selanjutnya Pra pelingkupan untuk mempersiapkan daftar panjang isu-isu lingkungan kemudian pelingkupan untuk memperoleh daftar pendek isu-isu lingkungan. Tahap berikutnya adalah pengkajian konsistensi pembangunan berkelanjutan RPJMD, pengkajian pengaruh RPJMD terhadap isu sosial budaya, ekonomi, dan



lingkungan. Tahap berikutnya adalah merumuskan mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif dan merumuskan rekomendasi yang diintegrasikan ke dalam RPJMD.

Dari proses pra pelingkupan didapatkan daftar panjang isu strategis pembangunan berkelanjutan sebanyak 309 isu, yang selanjutnya melalui proses pelingkupan didapatkan daftar pendek isu strategis pembangunan yang potensial menimbulkan dampak negatif terkait isu pembangunan berkelanjutan sebanyak 11 isu, yaitu:

- 1) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskemas pembantu dan jaringannya,
- 2) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata,
- 3) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku,
- 4) Program Pembangunan Gedung,
- 5) Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan,
- 6) Program Pengembangan Perumahan,
- 7) Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan,
- 8) Program pengembangan destinasi pariwisata,
- 9) Program pengembangan sentra-sentra industri potensial,
- 10) Program pembangunan rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan, dan
- 11) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan.

4.2.5.1. Kesimpulan

KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 telah disusun, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Peran KLHS sangat penting dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Implementasi KLHS juga diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya dampak lingkungan yang bersifat lintas batas dan lintas sektor. Pada isu strategis dan tercermin dalam visi pemerintah pada RPJMD Kabupaten Bantul, bahwa komitmen pemerintah Kabupaten Bantul menuju pembangunan yang berkelanjutan.



- b. Rumusan tujuan dan strategi RPJMD Kabupaten Bantul telah memuat pertimbangan pengarusutamaan lingkungan hidup.
- c. Rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), telah memperhatikan keterkaitan dan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

4.2.5.2. Rencana Tindak Lanjut

Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 telah disusun dengan memperhatikan rekomendasi KLHS sebagai berikut:

a. Umum

- 1) Pada beberapa program terdapat rekomendasi untuk melakukan pemantauan ataupun pengelolaan dari pelaksanaan program. Program tersebut dapat dilaksanakan dengan adanya pemantauan secara berkala dari kualitas lingkungan. Hal ini untuk menimalisir dampak samping yang akan berakibat pada lingkungan.
- 2) Selain itu, perlu adanya telaah lebih dalam mengenai peningkatan program infrastruktur ataupun peningkatan pendapatan kerja dengan berdampak pada perubahan tata guna lahan dalam beberapa tahun kedepan.
- 3) Pemerintah Kabupaten Bantul perlu melakukan harmonisasi materi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul serta menjabarkannya ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Proses harmonisasi dokumen rencana tersebut sekaligus digunakan untuk mengintegrasikan prinsip keterkaitan, prinsip keseimbangan dan prinsip keadilan pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup.
- 4) Dalam peningkatan pendapatan penduduk dengan peningkatan kegiatan produksi, maka pelaksanaan implementasi RKL (Rencana Kelola Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) harus terkelola dengan baik.
- 5) Dalam evaluasi RPJMD, sebaiknya dilakukan kajian dengan lingkup yang lebih kecil (kecamatan), karena KLHS menggambarkan karakteristik dari setiap wilayah. KLHS regional memang akan menghadapi persoalan oleh



adanya keragaman kebijakan yang terikat dalam suatu region atau wilayah. Dalam wilayah tersebut dapat ditemukan dan juga diperlukan aneka sektor, aneka tahap perkembangannya, aneka pelakunya dan aneka jangkauannya.

b. Teknis

- 1) Optimalisasi penerapan Sapta Usaha Tani didukung pemanfaatan teknologi dan modernisasi alat mesin pertanian yang ramah lingkungan serta mendorong penggunaan pupuk organik.
- 2) Mengembangkan regulasi ketahanan pangan/kedaulatan pangan termasuk pengendalian alih fungsi lahan pertanian utamanya LP2B dan reformasi agraria dalam rangka mempertahankan produksi dan produktifitas.
- 3) Pembangunan infrastruktur fisik diupayakan untuk meminimalkan menggunakan lahan pertanian/LP2B dalam rangka mempertahankan luasan areal produktif.
- 4) Untuk mempertahankan/meningkatkan/fungsi resapan air perlu menjaga areal terbuka, dan membudayakan sumur resapan dan bio-pori.
- 5) Untuk mengurangi emisi serta gejala Rumah Kaca perlu digalakkan kegiatan penghijauan disepanjang koridor jalan, baik wilayah pemukiman pedesaan, Jalan penghubung Desa, Jalan penghubung Kecamatan dan Jalan Kabupaten, serta Jalan Propinsi dan Jalan Negara.
- 6) Untuk menahan dan mengurangi pesatnya alih fungsi lahan sekitar wilayah perkotaan, fungsi pengendalian terhadap dan penegakan hukum perlu menjadi perhatian untuk ditingkatkan dan dikembangkan dengan mendasarkan pada rencana tata ruang dan peningkatkan peran serta masyarakat.

4.2.6. Penetapan Isu Strategis

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi Kabupaten Bantul dari berbagai aspek pembangunan, dapat dirumuskan beberapa isu strategis Kabupaten Bantul. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul 2016-2021 karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang



harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selama 3 (tiga) tahun ke depan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam menentukan isu strategis, maka dapat diidentifikasi isu strategis Kabupaten Bantul 2016-2021, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang antara lain meliputi kesehatan, pendidikan dan rohani.
2. Pengembangan komoditas unggulan sektor pertanian yang memberdayakan masyarakat lokal.
3. Pengembangan sektor pariwisata yang berdaya saing.
4. Mendorong sektor industri dan perdagangan sebagai salah satu unggulan dan daya saing daerah.
5. Pengelolaan lingkungan hidup secara lestari dan berkelanjutan.
6. Pengembangan sarana dan prasarana dasar dan yang menunjang aktivitas perekonomian.
7. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
8. Perwujudan masyarakat yang memiliki ketahanan sosial.
9. Pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian dan kehutanan

Beberapa keterangan tambahan terkait rumusan isu strategis di atas dan sejalan dengan isu strategis DIY adalah sebagai berikut:

a) Kerusakan Kawasan Pantai Akibat Abrasi

Kawasan pantai selatan yang berada di Kabupaten Bantul terutama di Kecamatan Srandakan, Sanden, dan Kretek dengan garis pantai kurang lebih 12 Km. Rusaknya ekosistem pantai dikhawatirkan mendorong terjadinya abrasi pantai. Dari ketiga kawasan pantai tersebut, saat ini telah mengalami abrasi walaupun tingkat kerusakannya berbeda-beda. Pantai Parangtritis tingkat abrasinya lebih kecil dibandingkan dengan Pantai Samas, Pandansimo, dan Kuwaru. Hal ini disebabkan adanya material gumuk pasir yang lebih banyak dibandingkan dengan pantai lainnya sehingga dapat menghalangi abrasi pantai.

b) Alih Fungsi Lahan



Peningkatan kebutuhan penduduk akan penyediaan perumahan, fasilitas pendidikan, kegiatan usaha menyebabkan banyak terjadi alih fungsi lahan terutama dari lahan pertanian menjadi non pertanian. Alih fungsi lahan banyak terjadi terutama di kawasan perkotaan, sedangkan dari sisi fungsinya wilayah Kabupaten Bantul sebagai daerah produksi pertanian yang produktif untuk DIY.

c) Kawasan Pantai Selatan

Kegiatan yang melebihi daya dukung di pantai selatan berpotensi menimbulkan ancaman lingkungan berupa abrasi dan hilangnya potensi gumuk pasir. Kegiatan tersebut seperti tambak udang, perkembangan bangunan akibat kegiatan wisata, dan lainnya.